

---

---

## **Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Guru Melalui Implementasi Kurikulum Nasional “2021” Di Lingkungan Disdik Kabupaten Bandung**

**Rusman, Laksmi Dewi**

Pengembangan Kurikulum SPs  
Universitas Pendidikan Indonesia  
Email: [rusman@upi.edu](mailto:rusman@upi.edu)

---

**Submitted : 27 Nov 2021- Revision: 9 Mar 2022 - Accepted: 16 Apr 2022 Available - Online: 30 May 2022**

---

### **ABSTRAK**

*Penerapan Kurikulum Nasional “2021” di sekolah dasar telah ditetapkan pemerintah melalui sekolah penggerak pada bulan Juli 2021 oleh Kabalitbang dan perbukuan Kemendikbud. Implementasi Kurikulum tersebut diharapkan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan proses pendidikan pada setiap satuan pendidikan yang mengarah pada upaya peningkatan mutu pembelajaran dan pendidikan. Dilatarbelakangi oleh adanya penerapan kurikulum Nasional “2021” tersebut, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini ingin menjawab permasalahan yang berkenaan dengan “Sejauhmanakah pengetahuan dan pemahaman guru dan kepala sekolah tentang konsep dan implementasi kurikulum Nasional “2021”? Bagaimana pemahaman dan keterampilan guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Nasional “2021”? Bagaimana pemahaman dan keterampilan guru dalam menerapkan Asesmen Nasional (AKM) dalam kurikulum Nasional “2021”? Setelah mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat para kepala sekolah dan guru SD memahami konsep Kurikulum Nasional “2021” para peserta lebih memahami tentang bagaimana mengimplemetasikan Kurikulum Nasional “2021”, dan para peserta juga memiliki pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan Asesmen Nasional khususnya Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dalam mengimplementasikan kurikulum Nasional “2021”.*

**Kata Kunci:** *Profesionalisme Guru, Implementasi Kurikulum “2021”.*

### **ABSTRACT**

*Implementation of the “2021” national curriculum in elementary schools have been determined by the government in July 2021 by Kabalitbang dan Perbukuan Kemendikbud.. Implementation of the curriculum is expected to encourage improvement in the quality of management and educational processes in each education unit that leads to efforts to improve the quality of learning and education. With the background of the implementation of the “2021” National curriculum, the implementation of this community service wants to answer the problems related to “To what extent is the knowledge and understanding of principals and teachers about the concept of the “2021” National curriculum? How are teachers' understanding and skills in implementing the “2021 National Curriculum” How are teachers' understanding and skills in implementing the National Assessment (AKM) in the “2021” National Curriculum? After participating in community service activities, school principals and elementary school teachers understand the concept of the “2021 National Curriculum” the participants understand more about how to implement the National Curriculum “ 2021”, and the participants also have the*

*understanding and skills in applying the National Assessment (AKM) in implementing the "2021" National curriculum.*

**Keywords:** *Teacher Professionalism, National Curriculum "2021".*

---

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan rendahnya kualitas pendidikan, dengan penduduk sekitar 225 juta orang (dalam Rencana Aksi Pendidikan untuk Semua, Ditjen PMPTK, tahun 2000 anak berusia 0-14 tahun berjumlah 62,78 juta, dan yang berusia 15 tahun ke atas ada 143,5 juta dengan kenaikan pada tahun-tahun berikutnya sebesar 1,4 %; angka tersebut lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia *at Glance*, Ditjen PMPTK, bahwa penduduk Indonesia pada tahun 1999 diperkirakan 210 juta, angka kenaikan tahun-tahun berikutnya 1,4%). Dari jumlah penduduk tersebut sekitar sepertiganya atau 75 juta orang adalah anak dan remaja. Angka tersebut mungkin lebih tinggi lagi, sebab angka partisipasi sekolah usia 7 sampai 18 tahun saja, pada tahun 1993 berjumlah 53.307.700 orang (Soedijarto, 1993:107-109), sedang dalam Indonesia *at Glance* anak di bawah 5 tahun berjumlah 22 juta (10 % dari penduduk), dan anak usia 5-14 tahun berjumlah 40 juta (19 % dari penduduk).

Apa arti dari angka tersebut? Dari sisi pendidikan dibutuhkan sarana dan prasarana, biaya, pengelola, kepala sekolah, dan guru untuk pelaksanaan program pendidikan sebanyak itu. Secara kasar diperlukan minimal 1, 6 juta guru kelas untuk jenjang pendidikan usia dini dan SD, dan minimal 2 juta guru bidang studi/mata pelajaran pada jenjang SLTP dan SLTA. Jumlah ini harus selalu ditambah karena ada penambahan penduduk dan guru yang pensiun.

Pengadaan, pengelolaan dan pembinaan terhadap guru sejumlah itu bukan masalah sederhana. Masalahnya menjadi semakin kompleks bila dihubungkan dengan persebarannya yang sangat luas dan kondisi

daerah yang sangat beragam. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, dipisahkan oleh pulau-pulau, selat dan laut, dengan tingkat perkembangan yang sangat bervariasi. Kompleksitas dan kesulitannya semakin tinggi lagi bila dihubungkan dengan tuntutan peningkatan standar mutu pendidikan. Dalam era informasi, globalisasi, dan pasar bebas, tuntutan standar mutu ini merupakan keharusan dan standarnya bukan lagi pada tingkat nasional, apalagi lokal, tetapi pada tingkat internasional.

Dengan tidak mengabaikan peranan dari faktor-faktor lain, fokus pada faktor kepala sekolah dan guru merupakan hal yang penting, khususnya upaya peningkatan profesionalisme kepala sekolah dan guru. Hal itu didasarkan atas pertimbangan bahwa kepala sekolah dan guru sebagai ujung tombak memegang peranan kunci dalam peningkatan mutu pendidikan. Mutu hasil pendidikan ditentukan oleh mutu proses pendidikan. Proses pendidikan direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh kepala sekolah dan guru. Efektivitas dari proses pendidikan sangat tergantung pada kemampuan dan kinerja kepala sekolah dan guru. Kemampuan kepala sekolah dan guru, yang meliputi penguasaan: kurikulum, landasan pedagogik, psikologik, dan sosial-budaya; pengetahuan dan bahan yang diajarkan; proses pendidikan, pembelajaran dan bimbingan siswa; evaluasi, dan manajemen kelas, monitoring dan evaluasi dll., diperoleh dalam pendidikan keguruan yang telah ditempuhnya. Penguasaan kemampuan tersebut diperkuat dan ditingkatkan melalui pengalaman dan pembinaan yang didapat selama melaksanakan tugasnya sebagai guru.

Pada tahun 2005 ada sekitar 45 juta anak dan remaja yang sedang belajar pada jenjang

PAUD, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di Indonesia, yang melibatkan sekitar 2,1 juta orang guru dan 240 ribu orang kepala sekolah (lihat tabel 1). Angka ini lebih kecil dari perkiraan sebelumnya, sebab pada tahun 1993 saja menurut Soedijarto jumlah seluruh siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (belum termasuk PAUD) berjumlah sekitar 53,3 juta orang. Dengan melihat APS masih ada sekitar 3,2% anak usia SD yang tidak bersekolah dan 16,5 % anak usia SLTP yang tidak bersekolah (tidak sekolah atau putus sekolah). Yang melek aksara telah mencapai 92,19% di daerah perkotaan dan 82,4% di daerah pedesaan, atau masih ada 7,81% di daerah perkotaan dan 17,6% di daerah pedesaan yang masih buta aksara (Rencana Aksi Nasional Pendidikan Untuk Semua, Ditjen PMPTK 2004).

Guru-guru yang mengajar pada jenjang pra-sekolah atau pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, pada umumnya telah mendapatkan pendidikan di bidang kependidikan atau keguruan. Sebagian kecil hanya berbekalkan pendidikan atau pelatihan Akta IV, dan sejumlah kecil guru melaksanakan pembelajaran tanpa dibekali penguasaan ilmu pendidikan dan pengajaran sama sekali. Pendidikan akta IV merupakan pendidikan atau pelatihan di bidang ilmu pendidikan dan pembelajaran untuk membekali mereka yang ingin menjadi guru. Pendidikan ini dilaksanakan sekitar satu tahun. Para peserta lebih banyak dibekali dengan hal-hal yang bersifat praktis, dan latihan praktik yang intensif.

Upaya peningkatan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk peningkatan bidang-bidang keahlian yang harus dimiliki oleh guru. Profesionalisme guru menuntut bahwa guru harus memiliki keahlian mengembangkan keilmuannya baik dalam bidang akademik, pedagogik, dan administratif. Dalam bidang pedagogik guru harus memiliki komitmen untuk terus menerus memperbaiki kinerjanya

khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilakukannya harus meningkat kearah yang lebih baik. Upaya perbaikan kinerja guru dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan kegiatan penelitian dan pelatihan.

Seiring adanya wabah Covid-19 Pemerintah telah menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Nomor 028/H/KU/2021 tentang Capaian Pelajaran Pada PAUD, SD, SMP, SMA, SDLB, SMPLB, dan SMALB pada Program Sekolah Penggerak. Program Studi Pengembangan Kurikulum Sekolah Pascasarjana UPI bekerjasama dengan Disdik Kabupaten Bandung melakukan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengambil tema "Peningkatan Profesionalisme Guru Melalui Implementasi Kurikulum Nasional bagi Kepala Sekolah dan Guru di Lingkungan Disdik Kabupaten Bandung"

## **2. METODE**

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Pelatihan Kurikulum Nasional "2021" melalui sosialisasi capaian pembelajaran dan profil pelajar pancasila pada kurikulum Nasional
2. Webinar Implementasi Kurikulum Nasional "2021" di Sekolah Dasar
3. Webinar Merdeka Belajar dalam Implementasi Kurikulum Nasional
4. Lokakarya Penerapan Asesmen Nasional melalui Asesmen Koempetensi Minimum (AKM) pada Kurikulum Nasional

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 pukul 08.00 s.d selesai. Kegiatan pelatihan dan lokakarya dilakukan secara daring/online melalui Zoom Cloud Meeting dengan Meeting ID: 989 8350 0869 dan Pascode: P2M

### **Peserta Pengabdian**

Khalayak sasaran kegiatan ini adalah kepala sekolah dan guru-guru SD di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung sebanyak 350 orang yaitu dari SDN Manggunharja 01, SDN Sukamenak Indah 01, SDN Palayangan, SDN Sindangsari 01, SDN Cicalengka 04, SD Talenta Kab. Bandung, SDIT insan KARIMA, SDN Bojongnangka, SDN Bojong 01 Koorwil Dinas Pendidikan Kecamatan Nagreg, SDN Majalaya 04, SD Zaidan Educare, SDN Ciaro 03, SDN Cobleng, SDN Ciseupan, SDN Kedokan, SDN Pamujaan 01, SDN Ciherang, SDN Sirnajaya 01, SDN Babakan Sondari 01, SDN Ciaro 02, SDN Trikarya, SDN Kinasatu, SDN Bojongbubu 01, SDN Pasirmalang 05, SDN Ridogalih 02, SDN Bojongkaso 02, SDN Babakan Wangi, SD Plus Marhas, SDN Muaraciwidey, SDN Cibeunying 03 Kec Cimencyan SDN Barutunggul 03 SDN Bojong 01 SDN Pasirmalang 05, SDN Cinanti, SDN Angkasa 06, SDN Bojongbubu 1, SDN Babakan Wangi, SDN Bojongsempur, SDN Katapang, SDN Pintu 01, SDN Palintangjaya, SDN Pasirmalang 05, SD Negeri Wargaluyu 02 Korwil Kec. Cikancung, SDN Dayeuhkolot 04, SDN Cigereleng, SD Negeri Pintu 01, SDN. Babakan Wangi, SDN Nyalindung, SDN Legokhayam Kec. Cilengkrang, SDN Bojongkunci 02, SDN Kanaan, SDN Cukanggenteng 02, SDN Cibanteng, SDN Nengta, SD Yayasan Atikan Sunda, SDN Bojongnangka, SDN Sukamaju 02, SDN Pasirluhur, SDN Cilame Nagreg, SDN Neglasari, SD Zaidan Educare, SDN Cicalengka 10, SDN Angkasa 12, SDN, SDN Cikancung 4, SDN Mekarlaksana, SDN Haurpugur 0, SDN Bojongbubu 1, SDN Bojongkunci 03, SDN Cikalamiring, SDN Kelepu SDN Wargaluyu 02, SDN Pamoyanan, SD Tahfizh Metode TES, SDN Palalangon, SD Negeri Nyalindung, SDN Taruna Pelita, SDN Bojongkoneng, SDN Bojongnangka, SDN Tanjunglaya 03, SDN Arjasari Barat, SDN Tenjolaya 03, SDN Angkasa 08, SDN Ciluluk 03, SDN Indragiri 1, SDN Wanasuka, SDN Pasirmalang 05, SDN Palalangon, SDN Bugel 01,

SDN Bojongmondro, SDN Cikapundung 1, SDN Kordon 01, SDN Tenjolaya 03, SDN Magung 01, SDN Pangadungan, SDN Tenjolaya 04, SDN Pangadungan, SD Negeri Bojongsoang 2, SDN Kendeng, SDN Bugek 01, SDN Pahlawan Kab. Bandung, SDN Nyalindung Nagreg, SDN Ciluluk 02, SDN Bojongkoneng 03, SDN Muara Ciwiday, SDN Bojongkaso 02, SDN Bugel 01, SDIT Insan Karima, SDN Cigereleng, SDN Ciluluk 03, SDN Barutunggul 03, SDN Margahayu 3, SDN Pasirluhur, SDN Pangadungan, SDN Cibeuneur, SDN Bojongkunci 03, SDN Malabar 4, SDN Wiwitan Kecamatan Ibum, SDN Tanara, SDN Juntigirang 01, SDN Cikancung 07, SDN Lebakwangi 01, SD Al-Mu'min, SD Nurri Halli SDN Batukarut 02, SDIT Uswatun Hasanah Baleendah, SDN Solokan Jeruk 06, SDN Pamucatan 02, SDIP Ummul Mukminin, SDN Sidamukti SDN Muaraciwidey, SDN Banjaraan 01 SDN Angkasa 12, SDN Cikasungka 01 SD Bojongsoang 2, SDN Margaasih, SDN Sukagalih, SD Jelegong 01, SDN Ciwaru, SDIT Az-Zahra, SDN Cukaanggenteng 01, SDN Sekepeuris 02, SDN Papakmanggu, SDN Cinangka 3, SDN Pameungpeuk 03, SDN Cukanggenteng 01, SDN Sawahlega 02, SDN Banjaran 01, SDN Legokhayam, SDN Cikatul, SDN Cibodas 02, SDN Cibanteng, SDN Ciparay 06, SDN Papakmanggu, SD Negeri Bojongmalaka 02, SDN Mekarlaksana, SDN Cilampeni 01, SDN Cihamerang, SDN Nenggeng, SDN Pasirangin Ibum SDN. Mekarlaksana, SDN Ciparay 06, SDN Warunglega 01, SDN Girimekar 1 SDN. Cilamoeni 01, SDN Pamujaan 01, SDN Nenggeng, SDN Ciwaru, SDN Tanjunglaya, SDN Pamucatan 01, SDN Cibolang, SDN Cigentur 02, SD Negeri Juntigirang 03, SD Negeri Babakan Siliwangi, SD Negeri Sukanagara 01, SDN Arcamanik 04, SDN Sukamaju 2, SDN Cinangka 2, SD Negeri Cikancung 02, SDN Astakrama, SD Negeri Cibeureum 01, SDN Wargaluyu 02, SDN Jati, SDN Lebakwangi 02, SD Negeri Narawita 01, SDN Kertabakti dan SD Negeri Srirahayu.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelatihan peningkatan profesional guru melalui implementasi Kurikulum Nasional ini dilaksanakan secara daring melalui zoom cloud meeting dengan link Zoom Cloud Meeting dengan Meeting ID: 989 8350 0869 dan Pascode: P2M

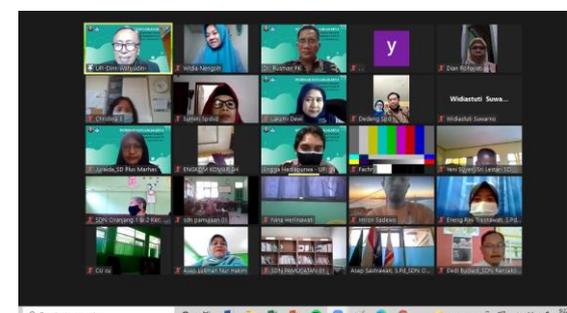
Kegiatan pelatihan peningkatan profesional guru melalui implementasi kurikulum Nasional dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan praktek penerapan proyek profil pelajar pancasila dan Asesmen Kompetensi Minimum (SKM). Ceramah dan tanya jawab dilakukan untuk membahas tentang konsep-konsep implementasi kurikulum Nasional dan merdeka belajar secara teoritis, sedangkan praktek dilakukan untuk memberikan keterampilan bagi guru dalam penerapan proyek profil pelajar Pancasila dan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).

Evaluasi terhadap kegiatan ini akan dilakukan dengan melihat partisipasi para peserta kegiatan, baik dalam hal kuantitas maupun dari segi kualitas. Kuantitas berkaitan dengan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini, sedangkan kualitas berkaitan dengan partisipasi mereka dalam pelaksanaan pelatihan yang dilakukan.

Pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan pelaporan, yang diperkirakan dalam waktu tiga bulan.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Pengembangan Kurikulum Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung diikuti oleh para kepala sekolah dan guru Sekolah Dasar sebanyak 350 peserta. Kegiatan diikuti dengan penuh kesungguhan berjalan dengan penuh semangat hal ini dibuktikan dengan mengikuti kegiatan sampai acara berakhir, sebagaimana terlihat dalam foto-foto

screenhoot di bawah ini terlihat para peserta PKM sedang serius mengikuti kegiatan webinar dan lokakarya PKM, dan para nara sumber sedang mengisi materi pada kegiatan PKM Prodi Pengembangan Kurikulum SPs Universitas Pendidikan Indonesia.



Para Peserta sedang Mengikuti Kegiatan PKM  
Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah tentang Implementasi Kurikulum 2013 pada Kondisi Khusus yaitu meliputi:



Narasumber sedang Menyampaikan Materi  
PKM



Narasumber sedang Menyampaikan Materi  
PKM

Filosofi dan Kebijakan Kurikulum Darurat/Kondisi Khusus di Era Pandemi Covid-19 di SD, Implementasi Kurikulum 2013 Kondisi Khusus di Era Pandemi Covid-19 di SD, Merdeka Belajar dalam Implementasi Kurikulum 2013 Kondisi Khusus di Era Pandemi Covid-19 di SD, Implementasi Saintifik dan Praktek Penilaian Autentik (soal HOTS) pada Implementasi Kurikulum 2013 Kondisi Khusus di Era Pandemi Covid-19 di SD.

**Implementasi Kurikulum Nasional**

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia yaitu antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan upaya tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (3) memerintahkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang merupakan produk undang-undang pendidikan pertama pada awal abad ke-21. Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan, yang diyakini akan menjadi faktor determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa dan negara Indonesia sepanjang jaman.

Dari sekian banyak unsur sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan salah satu unsur yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Jadi tidak dapat disangkal lagi bahwa kurikulum, yang dikembangkan dengan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi: (1) manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah; dan (2) manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan (3) warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi merupakan salah satu strategi pembangunan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pemerintah telah melaksanakan kurikulum Nasional mulai bulan Juli 2021 kepada 2500 sekolah penggerak yaitu 343 PAUD, 1.116 SD, 574 SMP, 382 SMA, dan 85 SLB. Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Nomor 028/H/KU/2021 tentang Capaian Pelajaran PAUD, SD, SMP, SMA, SDLB, SMPLB, dan SMALB pada Program Sekolah Penggerak. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 958/P/2020 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 162/M/2021 tentang Sekolah Penggerak.

## Landasan Penyempurnaan Kurikulum Nasional

### a. Landasan Yuridis

Pengembangan kurikulum didasarkan pada butir-butir kebijakan nasional dalam bidang pendidikan yang terdapat dalam dokumen sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menjadi landasan bagi perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu program yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. RPJMN menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra).

4. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan yang mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, melalui pengembangan kurikulum pendidikan yang dapat melayani keberagaman peserta didik, jenis, dan jalur pendidikan, serta kebutuhan pasar kerja dan pembangunan wilayah; peningkatan kualitas dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan lainnya; penyediaan sarana pendidikan yang bermutu;

peningkatan penelitian dan penyebaran hasil penelitian, serta pelaksanaan pengabdian pada masyarakat.

### b. Landasan Filosofis

Untuk pengembangan kurikulum sebagai wahana sistem pendidikan nasional, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk di dalamnya keseluruhan esensi sila-sila Pancasila sebagai *staat fundamenteele norm* atau norma dasar kehidupan bernegara (Soekarno 1945) sepenuhnya menjadi sumber rujukan utama dan muara dari keseluruhan pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, nilai-nilai idiil, instrumental, dan praksis yang terkandung dalam Pancasila secara konsisten dan koheren diupayakan untuk menjiwai kurikulum yang dikembangkan. Pancasila sebagai salah satu esensi dari identitas nasional bangsa Indonesia yang digali dari dan hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dan berkembang sepanjang sejarah serta menjadi sikap hidup dan ideologi nasional sepenuhnya menjadi rujukan filosofik dalam pengembangan kurikulum secara nasional.

Dalam konteks filsafat dan ideologi negara Pancasila, serta berbagai filsafat pendidikan yang menjadi wacana akademik keilmuan pendidikan, dan lazim digunakan oleh para pakar pendidikan di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pengembangan kurikulum, dikembangkan pemikiran sebagai berikut.

Berdasarkan Pancasila, kurikulum dikembangkan atas dasar filosofi sebagai berikut:

1. Kurikulum berakar pada budaya lokal dan budaya bangsa untuk membangun kehidupan masa kini dan masa mendatang (Dewantara, 1936; Bloomer, 1997; Brooks, 2002). Kurikulum harus selalu didasarkan pada apa yang dimiliki

suatu bangsa dari budaya lokal dimana peserta didik hidup sampai kepada budaya nasional dimana peserta didik menjadi salah satu anggota bangsa.

2. Kurikulum dikembangkan berdasarkan filosofi eksperimentalisme yang mengatakan bahwa proses pendidikan adalah upaya untuk mendekatkan apa yang dipelajari di sekolah dengan apa yang terjadi di masyarakat baik dalam bentuk menjadikan apa yang terjadi di masyarakat sebagai sumber konten kurikulum maupun mengembangkan potensi peserta didik sebagai *agent of change* dalam berpartisipasi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Filosofi yang dikenal dengan nama rekonstruksi sosial memberikan dasar bagi pengembangan kurikulum untuk menempatkan peserta didik sebagai subjek yang peduli pada lingkungan sosial, alam, dan lingkungan budaya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan filosofi bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi intelektual, berpikir rasional, dan kemampuan membangun masyarakat demokratis peserta didik menjadi suatu kemampuan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
4. Filosofi esensialisme (*essentialism*) dan perennialisme (*perennialism*) yang menempatkan kemampuan intelektual dan berpikir rasional sebagai aspek penting yang harus menjadi kepedulian kurikulum untuk dikembangkan. Manusia cerdas dan intelektual adalah manusia yang terdidik dan sekolah harus menjadi *centre for excellence*, di mana kurikulum memiliki tugas mengembangkan potensi manusia dalam aspek intelektual dan rasional semata.

Filsafat esensialisme dan perennialisme merupakan filsafat yang banyak digunakan dalam mengembangkan kurikulum di berbagai negara di berbagai belahan dunia dan penerapannya secara eksklusif akan menghasilkan manusia cerdas secara akademik tetapi kurang memiliki kepedulian sosial dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.

5. Kurikulum dikembangkan berdasarkan filosofi eksistensialisme (*existentialism*) dan romantik naturalisme (*romantic naturalism*) bahwa proses pendidikan adalah untuk mengembangkan rasa kemanusiaan yang tinggi, kemampuan berinteraksi dengan sesama dalam mengangkat harkat kemanusiaan, dan kebebasan berinisiatif serta berkreasi. Pandangan filsafat ini memberikan arahan bahwa setiap individu peserta didik adalah unik, memiliki kebutuhan belajar yang unik, serta perlu mendapatkan perhatian secara individual. Mereka adalah subjek dalam pendidikan yang memiliki kebebasan untuk menentukan kehidupan mereka.

#### c. Landasan Sosiologis

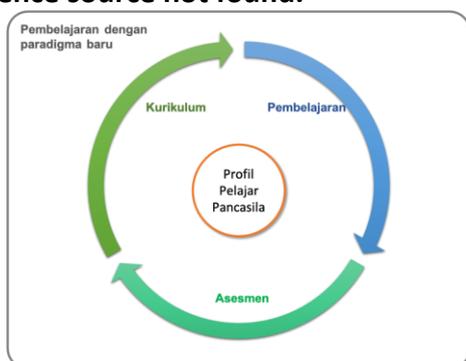
Landasan sosiologis dalam kurikulum nasional dikembangkan atas dasar adanya kebutuhan akan perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana termaktub dalam tujuan pendidikan nasional. Dewasa ini perkembangan pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Perubahan ini dimungkinkan karena berkembangnya tuntutan baru dalam masyarakat, dunia kerja, dan dunia ilmu pengetahuan yang berimplikasi pada tuntutan perubahan kurikulum secara terus menerus. Hal itu dimaksudkan agar pendidikan selalu dapat

menjawab tuntutan perubahan sesuai dengan zamannya. Dengan demikian keluaran pendidikan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya membangun masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*).

### Konsep Pembelajaran dengan Paradigma Baru.

Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga harapannya setiap peserta didik dapat belajar sesuai dengan tahap perkembangan capaian belajar serta kebutuhan belajarnya. Pembelajaran dengan paradigma baru ini melihat kurikulum, pembelajaran, dan asesmen sebagai komponen yang saling berkaitan erat sebagaimana yang ditunjukkan dalam

**Error! Reference source not found.**



Gambar 1.

### Kerangka Pembelajaran Dengan Paradigma Baru

Pembelajaran dengan paradigma baru mensinergikan rangkaian antara kurikulum – pembelajaran – asesmen. Hal ini karena kurikulum sebagai suatu rencana pembelajaran yang memandu guru dan peserta didik tentang tujuan apa yang perlu dicapai serta apa perlu dipelajari untuk mencapai tujuan tersebut. Pencaapaian tujuan tersebut, yang dalam **Error! Reference source not found.** ditunjukkan dalam lingkaran oranye, yaitu Profil Pelajar Pancasila, tidak cukup hanya mengandalkan kurikulum

namun juga perlu strategi pembelajaran yang efektif. Setiap peserta didik perlu mendapatkan kesempatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya, termasuk sesuai dengan tahap perkembangan dan tahap capaian belajarnya. Oleh karena itu, kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran perlu memperhatikan kondisi peserta didik yang diidentifikasi melalui asesmen. Dengan kata lain, kurikulum akan mempengaruhi pembelajaran, dan hasilnya akan dinilai melalui asesmen, dan kemudian asesmen akan memberikan informasi tentang kurikulum atau apa yang perlu dipelajari oleh peserta didik.

Disebut dengan “paradigma baru” karena sistem pembelajaran ini berusaha untuk mewujudkan teori pembelajaran yang terkini, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa dan sesuai dengan kebutuhan, minat, dan tahap capaian belajar mereka. Untuk membantu guru mewujudkannya, platform teknologi digital diperkenalkan di Sekolah Penggerak agar asesmen kelas, perancangan kurikulum, dan perencanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan bantuan teknologi digital. Dengan demikian paradigma baru ini tidak hanya berkaitan dengan teori-teori yang terbaru, namun juga teknologi yang memudahkan guru untuk menerapkan teori-teori tersebut di kelas.

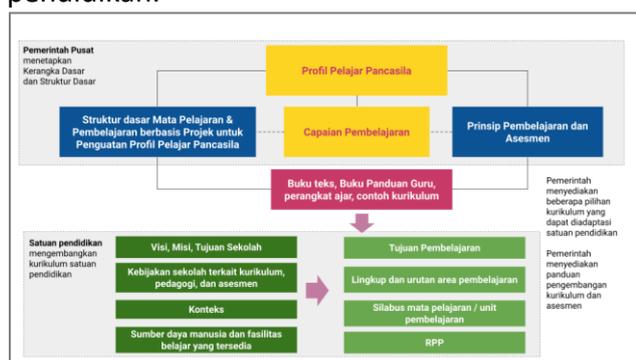
### Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum yang Disesuaikan dengan Profil Pelajar Pancasila

#### 1. Kerangka Dasar Kurikulum

Penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila adalah salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru. Kurikulum yang akan digunakan di Sekolah Penggerak adalah kurikulum operasional yang dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kerangka dasar kurikulum merupakan rancangan landasan utama dalam

pengembangan struktur kurikulum. Kerangka dasar kurikulum memuat tujuan pembelajaran dan prinsip serta standar yang perlu menjadi acuan pembelajaran. Kerangka dasar kurikulum mengarahkan kompetensi yang perlu dikuasai siswa, karakter yang perlu dibangun dan dikembangkan, serta materi pelajaran yang perlu dipelajari anak-anak Indonesia. Kerangka dasar kurikulum juga mengatur prinsip-prinsip yang perlu menjadi acuan guru ketika merancang pembelajaran dan asesmen di kelas. Gambar1 memperlihatkan hubungan antara kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan kurikulum operasional yang digunakan dalam pembelajaran di satuan pendidikan.



Gambar.2. Kaitan Antara Kerangka Dasar Kurikulum dan Kurikulum Yang Digunakan di Sekolah Penggerak

Gambar 2 memperlihatkan bahwa Pemerintah Pusat tidak menetapkan satu kurikulum tunggal, melainkan kerangka dasar kurikulum yang menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan, dalam hal ini di Sekolah Penggerak. Kerangka dasar kurikulum yang dimaksud terdiri dari Profil Pelajar Pancasila, Capaian Pembelajaran, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta struktur kurikulum yang terdiri dari pembelajaran intrakurikuler mata pelajaran dan kebijakan terkait pembelajaran berbasis proyek yang ditujukan untuk penguatan Profil Pelajar Pancasila. Sementara kurikulum yang digunakan sehari-hari di sekolah adalah

kurikulum satuan pendidikan, yang dalam Gambar 2 ditunjukkan dengan kotak-kotak hijau.

Menyadari bahwa pengembangan kurikulum satuan pendidikan bukanlah perkara yang mudah, maka Pemerintah Pusat juga menyediakan berbagai referensi contoh kurikulum satuan pendidikan dan perangkat ajar yang membantu sekolah dan guru yang masih mengalami kesulitan untuk merancang kurikulumnya sendiri. Sebagai alat bantu, penggunaan buku teks, perangkat ajar, serta contoh-contoh kurikulum yang disediakan Pemerintah Pusat bukanlah suatu kewajiban untuk sekolah dan guru. Materi-materi yang disediakan tersebut diharapkan dapat menjadi stimulan untuk sekolah dan guru agar dapat mengembangkan materi ajar mereka sendiri yang kontekstual dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik.

Alokasi waktu mata pelajaran SD Asumsi 1 Tahun = 36 minggu (kls 1-5)	Kegiatan reguler/minggu (pembulatan)	Projek (minimal 20% dari total per tahun)	TOTAL JP PER TAHUN
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan	108 (3)	36 (25%)	144

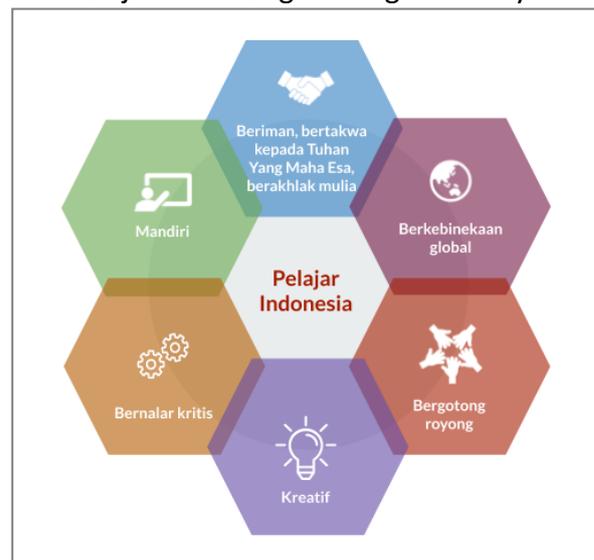
Yang Maha Esa dan Budi Pekerti*			
PPKn	144 (4)	36 (20%)	180
Bahasa Indonesia	198 (6)	54 (23%)	252
Matematika	170 (5)	46 (21%)	216
Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial	170 (5)	46 (21%)	216
Pilihan minimal 1:	108 (3)	36 (25%)	144
o Seni Musik			
o Seni Rupa			
o Seni Teater			
o Seni Tari			
PJOK	108 (3)	36 (25%)	144
<b>Total:</b>	<b>1006 (28)</b>	<b>290</b>	<b>1296</b>

### Profil Pelajar Pancasila

Profil Pelajar Pancasila adalah tujuan besar (atau misi) yang ingin diwujudkan melalui sistem pendidikan, sekaligus merupakan komitmen penyelenggara pendidikan dalam membangun sumber daya manusia Indonesia. Profil pelajar, profil lulusan (*graduate profile*), potret lulusan (*portrait of a graduate*), atau luaran dari sistem pendidikan (*student outcomes*) adalah beberapa istilah yang memiliki makna serupa dengan Profil Pelajar Pancasila. Profil Pelajar Pancasila merupakan jawaban dari pertanyaan penting: “karakter serta kemampuan esensial apa yang perlu dipelajari dan dikembangkan secara terus-menerus oleh setiap individu warga negara Indonesia, sejak pendidikan anak usia dini hingga mereka menamatkan sekolah menengah atas?” Kemampuan esensial yang dimaksud adalah kemampuan yang tidak hanya melekat pada mata pelajaran, melainkan kemampuan yang bertahan lama (dibandingkan pengetahuan yang diingat), yang dibangun selama seseorang belajar di satuan pendidikan, bahkan hingga individu sudah bertahun-tahun menyelesaikan pendidikannya. Karakter dan kompetensi yang termuat dalam Profil Pelajar Pancasila diharapkan menjadi bekal yang cukup bagi

setiap pelajar Indonesia untuk memaksimalkan potensi diri dan kecakapan hidupnya, serta hidup di tengah masyarakat dan turut berkontribusi dalam memajukan bangsa.

Perumusan Profil Pelajar Pancasila yaitu: “Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila.” Pernyataan ini memuat tiga kata kunci: pelajar sepanjang hayat (*lifelong learner*), kompetensi global (*global competencies*), dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan adanya paduan antara penguatan identitas khas dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, dengan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan konteks Abad 21, serta upaya individu untuk terus belajar dan mengembangkan dirinya.



Gambar 3. Enam Dimensi Profil Pelajar Pancasila

Profil Pelajar Pancasila yang demikian itu dapat dicapai melalui pengembangan keenam dimensinya. Gambar 3 menunjukkan enam dimensi tersebut, yaitu: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Keenam dimensi ini saling berkaitan satu sama lain dan satu dimensi menopang perkembangan dimensi lainnya. Oleh karena itu, keenamnya harus

menjadi perhatian karena tidak dan satu dimensi lebih penting daripada dimensi yang lain dan mengabaikan salah satu dimensi dapat menyebabkan dimensi lainnya sulit berkembang.

Penjelasan lebih mendalam tentang setiap dimensi dirumuskan agar pendidik serta pemangku kepentingan lainnya memahami karakter dan/atau kompetensi yang termuat dalam setiap dimensi. Penjelasan tersebut berupa karakteristik dan komponen-komponen yang ada dalam setiap dimensi, yang dinamakan elemen dan sub elemen. Setiap elemen didefinisikan dan diurutkan perkembangannya sesuai dengan tahap perkembangan psikologis dan kognitif anak dan remaja, teori terkait karakteristik tiap dimensi, serta karakter dan kemampuan yang diharapkan muncul dalam perkembangan tiap dimensi tersebut. Sebagai contoh, karakteristik individu yang melakukan penalaran dan berpikir kritis adalah adanya pemrosesan informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, serta refleksi dalam berpikir. Perkembangan setiap dimensi beserta elemen dan sub-elemennya disusun dalam fase-fase. Elemen dan sub-elemen ini merupakan komponen-komponen penting dari setiap dimensi, dan dinyatakan agar perkembangan setiap dimensinya dari suatu fase ke fase berikutnya menjadi konsisten dan utuh, tanpa ada elemen yang tertinggal.

Penjelasan yang lebih terperinci untuk setiap dimensi Profil Pelajar Pancasila termasuk tahap-tahap perkembangannya disampaikan dalam buku panduan pembelajaran projek Profil Pelajar Pancasila.

#### **Rasional Profil Pelajar Pancasila**

Indonesia telah menetapkan Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 di mana pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang "beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Selain itu, Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, telah mengkonstruksi visi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan sistem pendidikan nasional. Profil Pelajar Pancasila merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan tersebut ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Rumusan Profil Pelajar Pancasila dibuat agar satuan Pendidikan lebih dapat memahami dan melaksanakan arah dari upaya peningkatan Pendidikan. Sebagai penuntun arah, Profil Pelajar Pancasila menjadi pegangan pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi anak-anak Indonesia di ruang-ruang belajar yang lebih mikro. Selain itu, dengan adanya pembelajaran berbasis projek lintas mata pelajaran yang ditujukan untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila, maka semakin penting untuk guru memahami setiap dimensi dari Profil Pelajar Pancasila.

#### **4. SIMPULAN**

Setelah mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat Program Studi Pengembangan Kurikulum SPs Universitas Pendidikan Indonesia, para kepala sekolah dan guru sekolah dasar memahami konsep Kurikulum Nasional "2021", para peserta telah memiliki pemahaman tentang konsep kurikulum nasional yang telah diterapkan di sekolah penggerak, dan para peserta lebih memahami tentang bagaimana mengimplemetasikan kurikulum Nasional pada saat pandemi covid-19, dan para peserta juga memiliki pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan kurikulum merdeka belajar dan asesmen nasional khususnya pada asesmen kompetensi minimum (AKM) pada literasi dan numerasi di Sekolah Dasar.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik. 2004. *Survey Sosial Ekonomi Sosial (SUSENAS)*. Jakarta. BPS
- Ditjen PMPTK. 2004. *Rencana Aksi Nasional Pendidikan untuk Semua*. Jakarta. Kemdikbud.
- Keputusan Balitbang dan Perbukuan Nomor 018/H/KR.2020 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 Kondisi Khusus.
- PP Nomor 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta.
- Rusman, 2017. *Belajar dan Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Rusman, dkk (2021) *Naskah Akademik Kurikulum Nasional*. Jakarta Pusurbuk Kemendikbud.
- Soedijarto. 1993. *Menuju Pendidikan Nasional yang Relevan dan Bermutu*, Jakarta: Balai Pustaka.